

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus menyelaraskan antara aspek perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

KPPN Tegal merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai visi dan Misi serta mempunyai tugas untuk menyampaikan laporan keuangan. Untuk menjalankan Visi dan Misi tersebut, KPPN Tegal menggunakan dana APBN. Dalam siklus APBN terdapat perencanaan penganggaran, pembahasan APBN, Sebelum pelaksanaan dana APBN, KPPN Tegal wajib melakukan penyusunan APBN yaitu dari menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk menyusun DIPA kemudian mengajukan kepada Pejabat Eselon I dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) agar diteliti dan divalidasi hingga akhirnya ada penetapan DIPA untuk pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. Hal itu dinamakan penetapan APBN. Kemudian setelah penetapan APBN, terdapat pelaksanaan APBN, pelaporan dan pencatatan pelaksanaan APBN serta pemeriksaan dan pertanggungjawabannya.

Dalam Misi KPPN Tegal disebutkan bahwa KPPN Tegal memiliki misi untuk mewujudkan pengelolaan kas negara yang *prudent*, efisien dan optimal serta mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif dan akuntabel. Perwujudan pengelolaan kas negara dan mendukung kinerja pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN tersebut tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Menurut PP RI No.71 Tahun 2010, laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran. Dari informasi tersebut dapat dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya.

Pada tahun 2020, Indonesia pertama kali mengalami pandemi *COVID-19*. Oleh karena itu, Indonesia menerapkan bahwa untuk kegiatan perkantoran yang sebelumnya tatap muka kemudian beralih menjadi *Work From Home* (WFH). Dikarenakan hal ini, maka terjadi perbedaan alokasi dari tahun 2019 sebelum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

adanya *COVID-19*, tahun 2020 pandemi *COVID-19* dan tahun 2021 pelaksanaan implementasi *new normal*. Oleh sebab itu, penulis tertarik menganalisis untuk mengetahui apakah realisasi anggaran belanjanya sudah menunjukkan efisiensi dari ketiga tahun tersebut, untuk mengetahui apakah ada pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun, dan untuk mengetahui apakah dari ketiga tahun tersebut pelaksanaan anggarannya sudah sesuai dengan IKPA yang telah ditetapkan.

Pada penyusunan tugas akhir ini, penulis tertarik untuk menganalisis belanja pada KPPN Tegal karena dilihat dari realisasi anggaran belanja itu sendiri, penulis dapat menganalisis untuk mengetahui efisiensi pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan di KPPN Tegal sesuai dengan Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran (IKPA) yang telah ditetapkan. Menggunakan metode analisis varians belanja untuk mengetahui secara langsung besarnya selisih anggaran belanja dengan realisasi yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentasenya selama satu tahun. Metode analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar anggaran dan realisasi terwujud dalam seberapa jauh pemenuhan pada belanja kegiatan yang digunakan oleh pemerintah. Dan rasio efisiensi belanja untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Dari penjelasan diatas, penulis menyusun tugas akhir yang membahas tentang mekanisme penyusunan DIPA menurut PMK No.208/PMK.02/2019, pelaksanaan APBN yang tertuang pada LRA terkhusus anggaran belanjanya kemudian evaluasi dari analisis realisasi anggaran belanja untuk mengukur efisiensi penyerapan anggaran dari TA 2019 s.d. 2021 di KPPN Tegal. Penulis menyusun Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan berjudul “**Analisis Realisasi Anggaran Belanja TA 2019 s.d. 2021 untuk Mengukur Efisiensi Penyerapan Anggaran di KPPN Tegal**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka perumusan masalah yang terdapat dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menurut PMK No. 208/PMK.02/2019?
 2. Bagaimana analisis realisasi anggaran belanja TA 2019 s.d. 2021 di KPPN Tegal menggunakan analisis varians belanja?
 3. Bagaimana analisis realisasi anggaran belanja TA 2019 s.d. 2021 di KPPN Tegal menggunakan analisis pertumbuhan belanja?
 4. Bagaimana analisis realisasi anggaran belanja 2019 s.d. 2021 di KPPN Tegal menggunakan analisis rasio efisiensi belanja?
- Bagaimana evaluasi pelaksanaan anggaran KPPN Tegal pada TA 2019 s.d. 2021 sesuai dengan hasil analisis?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam menyusun Karya Ilmiah Tugas Akhir ini adalah:

1. Menjelaskan mekanisme penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menurut PMK No.208/PMK.02/2019.
2. Menjelaskan analisis realisasi anggaran belanja TA 2019 s.d. 2021 di KPPN Tegal menggunakan analisis varians belanja.

3. Menjelaskan analisis realisasi anggaran belanja TA 2019 s.d. 2021 di KPPN Tegal menggunakan analisis pertumbuhan belanja.
4. Menjelaskan analisis realisasi anggaran belanja 2019 s.d. 2021 di KPPN Tegal menggunakan analisis rasio efisiensi belanja.
5. Menjelaskan evaluasi pelaksanaan anggaran KPPN Tegal pada TA 2019 s.d. 2021 sesuai dengan hasil analisis.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang didapatkan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

Bagi Mahasiswa

Memberi informasi cara menganalisis sebuah realisasi anggaran belanja untuk mengukur efisiensi penyerapan anggaran belanja dan bahan acuan dalam penyusunan tugas analisis realisasi anggaran belanja di KPPN Tegal.

Bagi Pembaca

Memberikan informasi hasil analisis realisasi anggaran belanja atas efisiensi penyerapan anggaran belanja di KPPN Tegal.

Bagi Penulis

Tugas akhir ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan penulis tentang cara menganalisis anggaran belanja di sebuah instansi pemerintah.

Bagi KPPN Tegal

Memberikan masukan bagi instansi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis mengenai anggaran belanja.

Bagi Sekolah Vokasi IPB

Penulisan laporan akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana tambahan referensi pustaka di Perpustakaan Sekolah Vokasi IPB mengenai permasalahan yang terkait pada tugas akhir.